

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan studi kepustakaan, selain mendapatkan teori-teori berkaitan variable penelitian yang bersumber dari buku referensi juga memperoleh dari hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan variable penelitian. Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai masukan serta bahan pengkajian berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aida Safira, Amni Zarkasyi Rahman, Kismartini Kismartini (2022)

Judul penelitian ini “Komunikasi Kebijakan Penyediaan Lajur Sepeda Di DKI Jakarta”. Jurnal Tinjauan Kebijakan Publik dan Manajemen Vol. 11, No. 3 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi kebijakan penyediaan jalur sepeda di Provinsi DKI Jakarta dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat komunikasi kebijakan penyediaan jalur sepeda di Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah komunikasi kebijakan penyediaan jalur sepeda di Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya baik karena transmisi belum optimal bagi pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan, serta konsistensi komunikasi kebijakan belum optimal bagi kebijakan target grup.

2. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Savira Ayu Iskandar, Linda Dwi Rohmadiani (2020).

Judul penelitian “Analisis Efektifitas Jalur Sepeda Berdasarkan Metode *Bicycle Level Of Service* (BLOS)”. Jurnal Perencanaan dan Rekayasa Sipil Volume 03, Nomor 02, September 2020. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat efektifitas jalur sepeda pada koridor Jalan Basuki Rahmat Kota Surabaya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis *Bicycle Level Of Service* (BLOS).

Pengumpulan data dilakukan dengan survei dan dokumentasi. Hasil penelitian dari analisis BLOS bahwa hari Senin, Sabtu dan Minggu nilai BLOS adalah “F” lebih dari 5,5 artinya lingkungan tidak aman untuk sepeda kecuali hari Minggu pada jam 06.00-08.00 nilai BLOS adalah “D” artinya lingkungan kurang untuk sepeda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan jalur sepeda di Kota Surabaya masih kurang efektif karena masih banyak pengguna kendaraan bermotor, minimnya pengguna sepeda dan tujuan bersepeda hanya untuk rekreasi (*car free day*).

3. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Sharen Angel Monica (2022).

Judul Penelitian “Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penyediaan Jalur Sepeda Di Kota Makassar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penyediaan Jalur Sepeda di Kota Makassar dan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan yang dilakukan pemerintah kota Makassar terhadap penyediaan jalur sepeda menurut peraturan yang berlaku. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer atau data empiris yang merupakan hasil wawancara langsung dengan pejabat pemerintah terkait serta data sekunder berupa data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur atau bacaan terkait penelitian ini. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Makassar serta beberapa Komunitas Sepeda di Kota Makassar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disampaikan secara deskriptif untuk menggambarkan permasalahan terkait penelitian ini. Hasil dari Penelitian ini, yaitu: 1) Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Penyediaan Jalur Sepeda di Kota Makassar belum terlaksana sebagaimana diamanahkan peraturan perundang-undangan dan 2) Faktor yang menjadi penghambat belum tersedianya jalur sepeda di Kota Makassar adalah faktor hukum. Adapun

yang menjadi akibat hukum dari tidak tersedianya jalur sepeda di Kota Makassar adalah dengan tidak tersedianya regulasi terkait jalur sepeda di Kota Makassar memiliki akibat hukum yaitu ketidakpastian hukum sehingga kepentingan masyarakat tidak mendapatkan perlindungan hukum.

4. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Sulisty Satriawan dan Hidayatullah (2021).

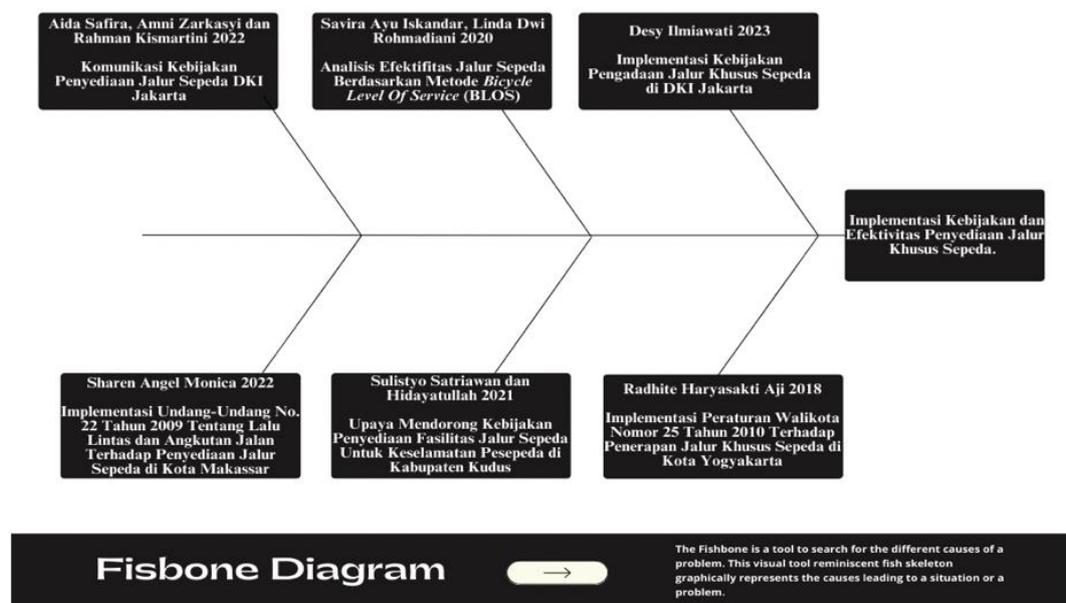
Judul Penelitian ini “Upaya Mendorong Kebijakan Penyediaan Fasilitas Jalur Sepeda Untuk Keselamatan Pesepeda Di Kabupaten Kudus”. Jurnal Suara Keadilan Vol. 22, No.2 Tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa penyediaan fasilitas jalur sepeda dengan tujuan melindungi keselamatan pesepeda dan mengurangi kemacetan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menguraikan tentang upaya mendorong kebijakan penyediaan fasilitas jalur sepeda untuk keselamatan pesepeda di Kabupaten Kudus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan penyediaan jalur sepeda dikatakan gagal dikarenakan aktor- aktor kebijakan tidak memahami perumusan kebijakan. Dishub hanya melakukan pengkajian sendiri tanpa berkoordinasi dengan instansi terkait dan aspirasi masyarakat sehingga dalam penganggaran tidak dapat disediakan.

5. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Radhite Haryasakti Aji (2018)

Judul Penelitian ini “Implementasi Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 Terhadap Penerapan Jalur Khusus Sepeda Di Kota Yogyakarta”.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 terhadap penerapan jalur khusus sepeda di Kota Yogyakarta dan faktor-faktor yang berperan terhadap implementasi tersebut. Hasil penelitian dianalisis menggunakan metode kualitatif meliputi kegiatan pengklasifikasian data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan. Faktor yang berperan dalam implementasi tersebut adalah kurangnya sosialisasi yang efektif oleh aparat penegak hukum, kesadaran

dan kepatuhan hukum masyarakat yang rendah serta tidak dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas oleh aparat penegak hukum. Melihat karena pelanggaran terjadi karena kurangnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum maka diharapkan memberikan upaya yang lebih maksimal agar jalur khusus sepeda menjadi aman bagi penggunaannya dan membuat ketertiban dalam berlalu lintas.



Gambar 2. 1 Diagram Fishbone

Berdasarkan diagram *fishbone* diatas dengan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, menunjukkan bahwa terdapat peneliti-peneliti sebelumnya yang juga melakukan penelitian terkait variabel Implementasi dengan objek Jalur Khusus Sepeda. Suatu penerapan kebijakan dari masing-masing instansi pemerintah sebagai masukan serta bahan pengkajian berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti saat ini, yakni Implementasi Kebijakan Pengadaan Jalur Khusus Sepeda Di DKI Jakarta.

Hubungan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diantaranya yaitu kesamaan dalam variabel penelitian yang membahas mengenai Implementasi Kebijakan Penyediaan Jalur Khusus Sepeda dan persamaan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus yang diteliti dan juga teori yang digunakan,

serta dalam penelitian terdahulu tersebut belum adanya penelitian yang membahas mengenai Implementasi Kebijakan Penyediaan Jalur Khusus Sepeda Di DKI Jakarta.

2.1. Kajian Teori

Untuk memperjelas dan memudahkan pemahaman pada penelitian ini, bagian ini menguraikan beberapa konsep teori yang digunakan untuk menjelaskan definisi dan hubungan aspek-aspek penelitian. Tujuan dari paparan ini adalah untuk memberikan batasan-batasan mengenai teori-teori yang menjadi dasar penelitian yang akan dilakukan, sesuai dengan fokus permasalahan. Menurut William Wiersma dalam Sugiyono (2014:41), teori merupakan generalisasi atau serangkaian generalisasi yang digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena tertentu secara sistematis.

Kemudian, menurut Sitirahayu Haditono dalam Sugiyono 2014:41, suatu teori akan memiliki arti yang penting jika dapat menggambarkan, menjelaskan, dan meramalkan fenomena yang ada. Selain itu, Hoy & Miskel (2001) juga menyatakan bahwa:

1. Teori berkaitan dengan konsep, asumsi, dan generalisasi yang logis.
2. Teori berfungsi untuk mengungkapkan, menjelaskan, dan memprediksi perilaku yang memiliki pola.
3. Teori berperan sebagai stimulus dan panduan untuk mengembangkan pengetahuan.

Dalam konteks penulisan skripsi ini, tinjauan teori akan dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1. Pengertian Kebijakan Publik

Penelitian yang dilakukan pada dasarnya mengacu pada kebijakan yang dibuat oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang Penyediaan Jalur Khusus Sepeda di DKI Jakarta. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengembangkan jalur sepeda di pusat kegiatan primer, sekunder, kawasan TOD dan pariwisata untuk mendorong gaya hidup masyarakat menuju penggunaan kendaraan

yang ramah lingkungan, maka penyediaan jalur sepeda sudah menjadi suatu keharusan untuk diimplementasikan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi.

Untuk memahami kebijakan publik, penting untuk memahami berbagai definisi dan teori yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memperhatikan pengertian dan teori yang diusulkan oleh para ahli.

Menurut Friedrich dalam Agustino (2016:16), kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang menghadapi hambatan dan peluang. Kebijakan tersebut diajukan dengan tujuan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada, sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:115), pengertian kebijakan adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan, keahlian, dan kearifan dalam bertindak.
- b. Sekumpulan konsep dan prinsip yang menjadi landasan dan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, atau cara bertindak (baik oleh pemerintah, organisasi, dll). Kebijakan juga mencakup pernyataan tentang cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud yang menjadi panduan dalam upaya mencapai tujuan.

Menurut Mustopadidjaja (LAN 2003:5), seorang ahli dalam kebijakan publik, kebijakan publik pada dasarnya adalah keputusan yang diambil untuk mengatasi masalah tertentu atau mencapai tujuan tertentu. Keputusan ini dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan.

Pelaksanaan kebijakan adalah tindakan yang terlihat setelah suatu kebijakan resmi dikeluarkan, yang melibatkan upaya pengelolaan masukan untuk menghasilkan keluaran atau hasil bagi masyarakat.

Tahap pelaksanaan kebijakan dapat dibedakan dari tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan, di satu sisi, merupakan proses yang berorientasi dari bawah ke atas, di mana proses kebijakan dimulai dengan menyampaikan aspirasi, permintaan, atau dukungan dari masyarakat. Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan memiliki logika dari atas ke bawah, di mana alternatif kebijakan yang bersifat abstrak atau makro diturunkan menjadi tindakan konkret atau mikro (Wibawa, 1994).

Menurut Nurdin Usman (2002), implementasi melibatkan berbagai aktivitas, tindakan, atau mekanisme yang terjadi dalam suatu sistem. Hal ini bukan hanya sekedar melakukan aktivitas semata, melainkan merupakan kegiatan yang direncanakan secara matang dan bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Guntur Setiawan (2004), implementasi melibatkan ekspansi aktivitas yang melibatkan proses interaksi yang saling menyelaraskan antara tujuan yang ingin dicapai dan tindakan yang dilakukan untuk mencapainya. Implementasi juga membutuhkan jaringan pelaksana yang efektif dan birokrasi yang terorganisir dengan baik.

Menurut Solichin Abdul Wahab (2012), Kamus Webster menyebutkan bahwa konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "to implement". Dalam Kamus Besar Webster, "*to implement*" berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu atau memberikan efek praktis terhadap sesuatu. Dengan demikian, implementasi mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menciptakan dampak atau akibat tertentu, baik melalui undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, keputusan peradilan, maupun kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam konteks kehidupan kenegaraan.

Solichin Abdul Wahab (2012) memberikan definisi umum mengenai implementasi kebijakan, yaitu bahwa implementasi adalah

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta. Tindakan-tindakan ini diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Grindle (1980) menyatakan bahwa implementasi adalah suatu proses administratif yang umum dan dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sementara itu, Van Meter dan Horn (1975) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor swasta, baik secara individu maupun kelompok, dengan tujuan mencapai tujuan tertentu. Grindle juga menambahkan bahwa proses implementasi hanya akan dimulai setelah tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun, dan dana telah tersedia dan dialokasikan untuk mencapai sasaran tersebut.

Implementasi sendiri menurut Budi Winarno (2018), mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya.

Pendekatan implementasi kebijakan dapat dilihat dari berbagai perspektif. Salah satunya adalah pendekatan masalah implementasi yang diperkenalkan oleh Edward III (1984: 9-10). Edward III mengajukan pendekatan tersebut dengan memunculkan dua pertanyaan utama, yaitu faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan? Dan faktor-faktor apa yang menghambat keberhasilan kebijakan?

Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut, empat faktor utama dirumuskan sebagai syarat penting dalam keberhasilan proses implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata kerja birokrasi.

Keempat faktor tersebut menjadi kriteria utama dalam implementasi suatu kebijakan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983:5), terdapat dua perspektif dalam analisis implementasi, yaitu perspektif administrasi publik dan perspektif ilmu politik. Dalam perspektif administrasi publik, implementasi awalnya dipandang sebagai pelaksanaan kebijakan dengan cara yang tepat dan efisien. Sementara itu, dalam perspektif ilmu politik, pendekatan sistem mendukung analisis implementasi dalam konteks kehidupan politik. Perspektif ini lebih berfokus pada pertanyaan sejauh mana konsistensi antara hasil kebijakan dan tujuannya.

Menurut Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin (1986), kompleksitas implementasi kebijakan tidak hanya ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga karena proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks. Variabel tersebut meliputi variabel individu maupun variabel organisasional, dan setiap variabel tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Dalam hal keterlibatan berbagai aktor dalam implementasi kebijakan, Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin menyatakan sebagai berikut:

“Implementation process involve many important actors holding diffuse and competing goals and expectations who work within a contexts of an increasingly large and complex mix of government programs that require participation from numerous layers and units of government and who are affected by powerful factors beyond their control” (Ripley, 1986:11).

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi publik dengan tujuan mengatur kepentingan masyarakat atau organisasi sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan publik dilaksanakan melalui administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah, yang melibatkan berbagai upaya

yang dilakukan oleh negara untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara luas atau kepentingan instansi tersebut.

2.2.2. Tahap – Tahap Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003:22), proses kebijakan merujuk pada rangkaian aktivitas intelektual yang terjadi dalam konteks kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis ini diilustrasikan sebagai serangkaian tahap yang saling terkait dan diatur berdasarkan urutan waktu. Di sisi lain, Winarno (2012:35) menyatakan bahwa proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses dan variabel yang perlu dianalisis. Proses penyusunan kebijakan publik tersebut dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahapan-tahapan dalam kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Agenda

Pejabat yang terpilih dan diangkat memiliki peran penting dalam menentukan masalah-masalah yang masuk ke dalam agenda publik. Sebelumnya, masalah-masalah ini bersaing untuk mendapatkan perhatian agar dapat dimasukkan ke dalam agenda kebijakan. Akhirnya, beberapa masalah berhasil masuk ke dalam agenda kebijakan yang disusun oleh pembuat kebijakan. Pada tahap ini, beberapa masalah mungkin tidak diperhatikan sama sekali, sementara masalah lain menjadi fokus utama pembahasan. Selain itu, ada juga masalah yang ditunda untuk jangka waktu yang lama karena alasan-alasan tertentu.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Pejabat yang terpilih dan diangkat memiliki peran penting dalam menentukan masalah-masalah yang akan menjadi perhatian dalam agenda publik. Sebelumnya, masalah-masalah tersebut saling berkompetisi untuk mendapatkan perhatian agar dapat dimasukkan

dalam agenda kebijakan. Akhirnya, beberapa masalah berhasil dimasukkan dalam agenda kebijakan yang disusun oleh pembuat kebijakan. Pada tahap ini, beberapa masalah mungkin tidak mendapatkan perhatian sama sekali, sementara masalah lain menjadi fokus utama dalam pembahasan. Selain itu, terdapat pula masalah yang ditunda untuk jangka waktu yang lama karena alasan-alasan tertentu.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari banyaknya pilihan kebijakan yang diajukan oleh para pembuat kebijakan, pada akhirnya satu dari alternatif kebijakan tersebut dipilih dengan dukungan mayoritas di lembaga legislatif, konsensus antara para direktur lembaga, atau melalui keputusan pengadilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Sebuah program kebijakan hanya akan menjadi dokumen-dokumen elit jika tidak dijalankan. Oleh karena itu, keputusan mengenai program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif solusi masalah harus diimplementasikan, yaitu dilaksanakan oleh badan administrasi dan agen pemerintah di tingkat yang lebih rendah. Kebijakan yang telah diambil dijalankan oleh unit administrasi yang menggunakan sumber daya keuangan dan tenaga manusia.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada fase ini, kebijakan yang telah dilaksanakan akan dinilai atau dievaluasi untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil dalam menyelesaikan masalah yang ada. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat dengan tujuan mencapai dampak yang diharapkan.

2.2.3. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Program kebijakan harus dijalankan

agar dapat memiliki dampak dan mencapai tujuan yang diinginkan. Studi implementasi merupakan studi yang fokus pada proses pelaksanaan suatu kebijakan.

Menurut Udoji dalam Agustino (2016:129), pelaksanaan kebijakan sangat penting bahkan mungkin lebih penting daripada pembuatan kebijakan itu sendiri. Kebijakan hanya akan menjadi impian atau rencana yang baik yang terdokumentasikan dengan baik jika tidak dijalankan. Sementara itu, Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:149) mendefinisikan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.

Implementasi kebijakan adalah tahap krusial dalam kebijakan publik yang berada di antara pembentukan kebijakan dan dampak kebijakan terhadap masyarakat yang terpengaruh. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak mampu mengatasi masalah yang menjadi target kebijakan tersebut, maka kebijakan tersebut berpotensi mengalami kegagalan, meskipun diimplementasikan dengan baik. Sebaliknya, sebuah kebijakan yang direncanakan dengan baik juga dapat mengalami kegagalan jika pelaksanaan kebijakan tersebut kurang baik oleh para pelaksana kebijakan (Winarno, 2012:177).

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur melalui proses dan pencapaian tujuan akhir (*output*). Hal ini sejalan dengan pendapat Grindle dalam Agustino (2016:129) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditetapkan dan apakah tujuan program tersebut tercapai.

2.2.3.1 Model Implementasi Kebijakan

Model-model implementasi digunakan secara luas untuk membantu pengamat atau pembelajar pemula. Menurut

Nugroho (2008:167), terdapat dua jenis model implementasi kebijakan publik yang umum, yaitu model top-down (dari atas ke bawah) dan bottom-up (dari bawah ke atas), serta model komando dan kontrol (*command-and-control*) dan model pasar (*economic incentive*). Pendekatan top-down mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan dimulai dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga pelaksanaannya bersifat terpusat. Pendekatan ini berpandangan bahwa keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh aparat, administrator, atau birokrat di semua tingkatan, terutama tingkat bawah.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Lester & Stewart dalam Agustino (2016:130) menyebut pendekatan ini sebagai pendekatan kontrol dan komando (*command-and-control approach*). Sementara itu, perkembangan teori implementasi kebijakan yang berorientasi "*bottom-up*" disebut sebagai pendekatan pasar (*market approach*) oleh Lester & Stewart dalam Agustino (2016:131). Mereka berpendapat bahwa untuk menyelesaikan masalah publik, lebih baik dimulai dari bawah, yang memahami dan mengenal konteks masalah yang dirasakan oleh mereka.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas pada perbedaan pendekatan top-down dan bottom-up, Sabatier (1984) membuat suatu ringkasan elemen-elemen yang berbeda dari dua pendekatan, antara lain:

Tabel 2. 1 Pendekatan Implementasi

	<i>Top-down</i>	<i>Bottom-up</i>
Fokus awal	Kebijakan pemerintah (pusat)	Jaringan implementasi pada level paling bawah
Identifikasi aktor utama yang terlibat dalam proses	Dari pusat (atas) dilanjutkan kebawah sebagai konsekuensi implementasi	Dari bawah, yaitu para implementer pada level lokal ke atas
Kriteria Evaluasi	Berfokus pada pencapaian tujuan formal yang dinyatakan dalam dokumen kebijakan	Kurang begitu jelas apa saja yang dianggap peneliti penting dan punya relevansi dengan kebijakan
Fokus secara keseluruhan	Bagaimana mekanisme implementasi bekerja untuk mencapai tujuan kebijakan	Interaksi strategis antar berbagai aktor yang terlibat dalam implementasi

Sumber: Sabatier (1982:277)

Berikut ini diuraikan lebih rinci model-model implementasi kebijakan publik (Agustino, 2016) yaitu antara lain:

a. Teori Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward

Dalam studinya, Edwards III (1980) mengemukakan beberapa variabel yang sedikit berbeda dengan beberapa ahli lainnya, terutama yang terkait dengan variabel implementasi utama. Perbedaan tersebut terlihat jelas dalam hal faktor implementasi, di mana faktor komunikasi dianggap sebagai variabel atau faktor yang paling penting yang mempengaruhi atau berperan dalam proses implementasi kebijakan. Karena perbedaan tersebut, Edwards III (1980) menjadi populer dan sering dikutip

oleh banyak ahli ketika membahas proses implementasi untuk jenis kegiatan publik tertentu.

Menurut Edwards III (1980:1), dalam implementasi kebijakan terdapat tantangan teknis dan manajerial, yang melibatkan:

“Policy implementation, as we have seen, is the stage of policymaking between the establishment of a policy - such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handling of a judicial decision, or promulgation of a regulatory rule - and the consequences of the policy for the people whom it affect.”

Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik memiliki dampak tertentu pada masyarakat yang menjadi tujuan dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Dampak tersebut dapat berupa konsekuensi yang diharapkan karena memberikan manfaat positif, namun juga dapat terdapat konsekuensi yang tidak diharapkan dan merugikan pihak-pihak tertentu.

Setelah itu, Edwards III (1981: 9-12) mengulas faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dia menyebutkan:

“four critical factors or variables in implementing public policy : communication, resources, dispositions or attitudes and bureaucratic structure”

Lebih lanjut, dia menjelaskan tentang pengertian dari keempat faktor tersebut:

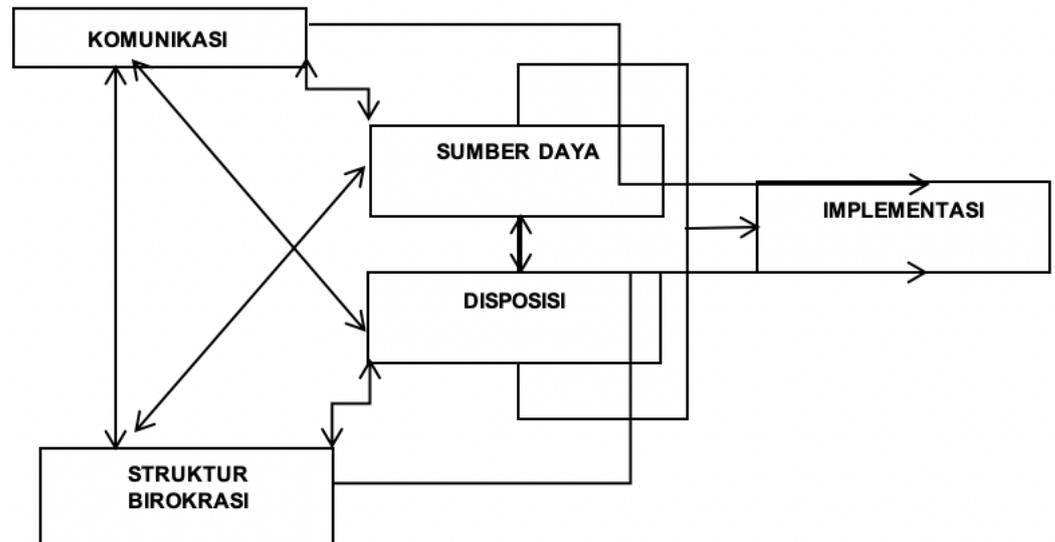
“Communication: For implementation to be effective, those whose responsibility it is implemented a decision must know what they are supposed to do orders to implement policies must be transmitted to the appropriate personnel, and they must be clear, accurate and consistent”.

“Resources: Important resources include staff of proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information ... and facilities (including buildings, equipment, land and supplies)”.

“Disposition or attitudes: If implementation is to be proceed effectively, not only must implementators know what to do

and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy”.

“Bureaucratic structure: Implementation may still be thwarted because of deficiencies in bureaucratic structure, organizational fragmentation may hinder the coordination necessary”.



Gambar 2. 2 Model Implementasi Edward III

Sumber : Agustino, L. (2016)

Dari keempat faktor tersebut, komunikasi ditempatkan pada posisi teratas dalam pengaruhnya terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Hal ini berkaitan dengan interaksi dan hubungan antara pembuat kebijakan (pengambil keputusan) dengan pelaksana kebijakan, serta komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran. Untuk melaksanakan kebijakan dengan baik, pelaksana kebijakan harus memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang substansi teknis dan latar belakang historis serta filosofis kebijakan tersebut. Dalam hal ini, Edwards III (1980) menunjukkan tiga variabel indikator yang harus dipenuhi agar komunikasi kebijakan berjalan secara efektif, yaitu penyampaian antara komunikator dan komunikan harus dirancang

dengan baik melalui saluran komunikasi yang sesuai dan memperhatikan hambatan komunikasi yang mungkin terjadi.

Variabel berikutnya menurut Edwards III (1980) adalah ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, termasuk jumlah staf, kualitas pelaksana, informasi terkait pelaksanaan kebijakan, wewenang yang memadai, dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan baik secara anggaran maupun fasilitas kerja. Kapasitas sumber daya tersebut harus sesuai dengan tingkat masalah, cakupan jangkauan, dan jumlah sasaran yang harus dicapai.

Variabel ketiga yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan adalah variabel disposisi, yang mencakup sikap dan perilaku pelaksana. Meskipun komunikasi dan sumber daya telah berjalan dengan baik, jika tidak didukung oleh sikap para pelaksana, pelaksanaan kebijakan tidak akan efektif. Edwards III menunjukkan tiga variabel indikator dari disposisi, yaitu dimensi efek sikap seperti sikap ego sektoral, penempatan staf birokrasi, dan faktor pendorong yang menjadi motivasi bagi pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan efektif.

Variabel terakhir adalah struktur birokrasi, di mana Edwards III (1980) menggambarkan aspek-aspek pembagian tugas dan mekanisme pelaksanaan melalui penetapan Prosedur Operasi Baku (*Standard Operating Procedure*).

Keempat variabel dalam model yang dikembangkan oleh Edward III saling terkait dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan dan target program atau kebijakan. Masing-masing variabel saling berkolaborasi dalam upaya mencapai tujuan tersebut, dan satu variabel dapat sangat mempengaruhi variabel lainnya. Selain itu, terdapat pula aplikasi konseptual dari model implementasi Edward III yang dapat ditemukan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 2 Aplikasi Konseptual Implementasi Edward III

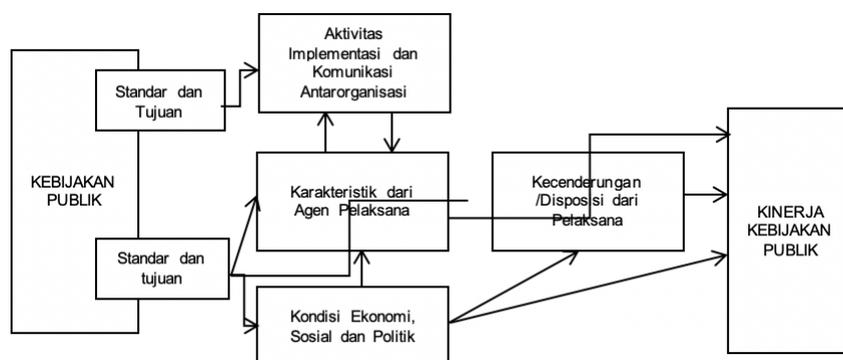
Aspek	Ruang Lingkup
Komunikasi	<p>a. Implementor dan kelompok sasaran dari program/kebijakan</p> <p>b. Sosialisasi program/kebijakan efektif dijalankan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metode yang digunakan - Intensitas Komunikasi
Sumber Daya	<p>a. Kemampuan Implementor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pendidikan - Tingkat pemahaman terhadap tujuan dan sasaran - Aplikasi detail program - Kemampuan menyampaikan program dan mengarahkan <p>b. Ketersediaan Dana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana yang dialokasikan -Prediksi kekuatan dana dan besaran biaya untuk implementasi program/kebijakan
Disposisi	<p>Karakter Pelaksana</p> <p>a. Tingkat komitmen dan kejujuran dapat diukur dengan tingkat konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan. Semakin sesuai dengan standar semakin tinggi komitmennya.</p> <p>b. Tingkat demokratis dapat dengan intensitas pelaksana melakukan proses sharing dengan kelompok sasaran, mencari solusi dan masalah yang dihadapi dan melakukan diskresi yang berbeda dengan standar guna mencapai tujuan dan sasaran program.</p>
Struktur Birokrasi	<p>a. Ketersediaan SOP yang mudah dipahami</p> <p>b. Struktur organisasi, rentang kendali antara pucuk pimpinan dan bawahan dalam struktur organisasi pelaksana. Semakin jauh berarti semakin rumit, birokratis dan lambat untuk perkembangan program</p>

Sumber:(Indiahono, 2017:34)

b. Teori Implementasi Kebijakan menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) adalah salah satu teori yang sering digunakan dalam studi mengenai implementasi kebijakan publik. Teori ini menggambarkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah suatu proses yang kompleks, melibatkan banyak aktor yang berbeda, dan bertujuan untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), terdapat empat dimensi penting dalam implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, birokrasi, dan disposisi. Dimensi komunikasi berkaitan dengan bagaimana informasi tentang kebijakan disampaikan kepada masyarakat dan bagaimana masyarakat merespons kebijakan tersebut. Dimensi sumber daya berhubungan dengan ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, seperti anggaran, tenaga kerja, dan fasilitas. Dimensi birokrasi berfokus pada struktur organisasi dan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan. Sedangkan dimensi disposisi menekankan sikap dan motivasi dari para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.



Gambar 2. 3 Model Implementasi Van Meter dan Van Horn

Sumber: Agustino, L. (2016)

Dalam teori ini, Van Meter dan Van Horn (1975) juga mengidentifikasi lima faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu karakteristik kebijakan, karakteristik implementor, karakteristik target, karakteristik lingkungan, dan karakteristik interaksi antar aktor. Karakteristik kebijakan berhubungan dengan sifat dan tujuan kebijakan yang akan diimplementasikan. Karakteristik implementor berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Karakteristik target mengacu pada karakteristik kelompok atau individu yang menjadi sasaran kebijakan. Karakteristik lingkungan mencakup faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Sementara itu, karakteristik interaksi antar aktor menyoroti hubungan dan interaksi antara para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Dalam penelitian ini, teori implementasi kebijakan menurut Edward III digunakan sebagai kerangka untuk mengukur Implementasi Kebijakan dalam konteks Pengadaan Jalur Khusus Sepeda di DKI Jakarta. Empat faktor utama yang diajukan oleh Edward III dijadikan acuan dalam mengukur implementasi kebijakan. Penggunaan teori implementasi kebijakan menurut Edward III dipilih karena relevansi dan kesesuaian dengan fokus penelitian, yaitu Pengadaan Jalur Khusus Sepeda di DKI Jakarta.

2.2.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Dalam pelaksanaan kebijakan, tentu terdapat faktor yang mendukung dan juga faktor yang menghambat implementasi tersebut. Faktor pendukung merujuk pada elemen yang mendukung suksesnya pelaksanaan kebijakan, sehingga tujuan pelaksanaan dapat tercapai. Sebagaimana diungkapkan oleh Winarno (2002:102), alat administrasi hukum merupakan instrumen yang

terdiri dari berbagai unsur seperti aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama untuk menjalankan kebijakan guna mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, elemen pendukung pelaksanaan kebijakan ini adalah komponen alat administrasi hukum yang beroperasi bersama.

Melalui pendekatan transaksional yang dikembangkan oleh Donald P. Warwick sebagaimana dikutip dalam Tacjhan (2006:28), tergambar model yang menekankan pentingnya hubungan antara perencanaan dan implementasi dalam pemahaman terhadap berbagai masalah yang muncul pada tahap pelaksanaan rencana atau kebijakan. Proses perencanaan dan pelaksanaan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Saat tahap implementasi berlangsung, berbagai kekuatan akan berinteraksi, baik yang mendorong (*facilitating condition*) maupun menghambat (*impeding condition*) pelaksanaan program atau proyek. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Faktor Pendukung (*facilitating conditions*):
 - a. Komitmen dari pemimpin politik.
 - b. Kapasitas organisasi.
 - c. Komitmen pelaksana.
 - d. Dukungan kelompok kepentingan.
2. Faktor Penghambat (*impeding conditions*):
 - a. Keterlibatan banyak aktor.
 - b. Loyalitas atau komitmen ganda.
 - c. Kerumitan bawaan dari proyek-proyek.
 - d. Proses pengambilan keputusan yang kompleks.
 - e. Faktor waktu dan perubahan kepemimpinan.

Imronah (2009) juga mengajukan pendekatan yang berbeda terkait implementasi kebijakan. Menurut Edward III (1984), pendekatan masalah implementasi mengajukan dua pertanyaan utama: faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi,

dan faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi. Dari sini, dapat diidentifikasi empat faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi, yaitu komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, sikap pelaksana, struktur organisasi, dan tata aliran kerja birokrasi. Suksesnya implementasi kebijakan juga tergantung pada proses implementasi dan hasilnya. Perspektif proses melibatkan kesesuaian dengan panduan pelaksanaan yang mencakup berbagai aspek seperti cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran, dan manfaat program. Sementara dari perspektif hasil, program akan dianggap berhasil jika menghasilkan dampak yang diinginkan.

Menurut Ripley dan Franklin (1986: 12), keberhasilan implementasi dapat diukur melalui tiga aspek utama: tingkat kepatuhan birokrasi terhadap tingkatan yang lebih tinggi, kelancaran rutinitas, dan pencapaian tujuan dan dampak yang diharapkan dari program.

Dalam kesimpulannya, implementasi adalah tahap lanjutan dari kebijakan yang tertulis dalam dokumen kebijakan menjadi tindakan nyata untuk mencapai tujuan. Keberhasilan atau kegagalan suatu program bergantung pada hasil implementasi, yang dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat selama proses pelaksanaan kebijakan.

2.3 Konsep Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur

Konsep implementasi peraturan gubernur mengacu pada proses atau tindakan penerapan dan pelaksanaan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur suatu wilayah atau provinsi. Setelah peraturan gubernur dikeluarkan, langkah berikutnya adalah menerapkan peraturan tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari di wilayah yang terkait.

Implementasi peraturan gubernur mencakup serangkaian langkah, termasuk pengenalan peraturan kepada masyarakat, lembaga, atau sektor yang

terpengaruh, serta pelaksanaan aturan-aturan yang tercantum dalam peraturan tersebut. Hal ini melibatkan kerja sama berbagai pihak, seperti instansi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Selain itu, implementasi peraturan gubernur juga melibatkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa peraturan tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika ada hambatan atau kendala dalam implementasi, dapat dilakukan perbaikan atau penyesuaian agar peraturan tersebut lebih efektif dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan wilayah yang terkait.

Sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2019 tentang Penyediaan Lajur Sepeda, Pasal 2 menjelaskan dengan jelas bahwa lajur sepeda adalah tempat khusus yang diperuntukkan bagi berbagai jenis kendaraan seperti sepeda, sepeda listrik, otopet, skuter, hoverboard, dan unicycle. Sementara itu, Pasal 3 dari peraturan tersebut menguraikan konsekuensi pelanggaran terhadap marka jalan dan rambu lalu lintas di lajur sepeda, sesuai dengan definisi yang diberikan dalam Pasal 1 ayat (1). Pelanggaran tersebut diancam dengan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2019 ini memiliki ketentuan yang jelas mengenai penggunaan lajur sepeda dan sanksi bagi pelanggarannya, dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan dalam mobilitas para pengguna sepeda dan kendaraan sejenisnya di wilayah DKI Jakarta.

2.4 Konsep Penyediaan

Penyediaan merujuk pada tindakan atau proses menyediakan atau menyelenggarakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan. Dalam konteks yang lebih spesifik, penyediaan dapat mengacu pada langkah-langkah atau upaya untuk menyediakan fasilitas, layanan, atau sumber daya

tertentu untuk memenuhi kebutuhan atau memfasilitasi pelaksanaan suatu kegiatan.

Dalam konteks pernyataan sebelumnya tentang "kebijakan penyediaan lajur sepeda," itu berarti tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk menyediakan lajur atau jalur khusus bagi pengguna sepeda dalam infrastruktur jalan atau transportasi. Tujuan dari kebijakan ini mungkin untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan bagi para pengguna sepeda, mengurangi kemacetan lalu lintas, serta mendorong mobilitas berkelanjutan dan ramah lingkungan.

2.4.1 Konsep Transportasi

Menurut Nasution (1996), transportasi dapat diartikan sebagai proses pemindahan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Dalam konteks ini, terdapat tiga elemen penting, yaitu muatan yang diangkut, kendaraan sebagai sarana transportasi, dan jalan yang dapat dilalui. Proses ini melibatkan perpindahan dari tempat asal ke tempat tujuan. Dengan adanya aktivitas pemindahan barang dan manusia seperti itu, transportasi memiliki peranan yang penting sebagai pendukung dalam kegiatan ekonomi dan juga sebagai penyedia jasa bagi perkembangan ekonomi.

Perekonomian DKI Jakarta mengalami peningkatan pada kuartal II 2022. Pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta mencapai 5,59% (yoy) pada periode tersebut, melebihi pertumbuhan pada kuartal sebelumnya yang sebesar 4,62% (yoy). Pemulihan ekonomi DKI Jakarta terus berlanjut berkat peningkatan mobilitas dan aktivitas masyarakat seiring dengan program vaksinasi booster, perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), serta adanya berbagai acara di DKI Jakarta. Dengan kasus COVID-19 yang terkendali, Pemerintah telah

memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level I dengan aturan 100% kapasitas di berbagai tempat.

Perekonomian DKI Jakarta berkontribusi sebesar 16,66% terhadap perekonomian nasional pada kuartal II 2022, mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,44% (yoy). Dalam hal pengeluaran, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta didorong oleh peningkatan kinerja hampir semua komponennya, kecuali Konsumsi Pemerintah yang mengalami kontraksi. Dari segi lapangan usaha (LU), sektor-sektor utama yang berkontribusi terhadap perekonomian DKI Jakarta, seperti Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Industri Pengolahan, Jasa Keuangan, dan Konstruksi, mencatat pertumbuhan yang positif pada kuartal II 2022.

Pergeseran era penggunaan transportasi umum terjadi ketika jumlah kendaraan pribadi roda empat dan roda dua meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Hal ini juga disertai dengan peningkatan jaringan jalan yang lebih baik dan harga bahan bakar minyak (BBM) yang lebih terjangkau, berkat peningkatan kesejahteraan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Namun, peningkatan jumlah kendaraan pribadi yang melebihi batas telah menimbulkan banyak masalah, terutama di perkotaan. Kemacetan mulai muncul di mana-mana, keterbatasan lahan juga menjadi masalah tersendiri, polusi udara semakin mengkhawatirkan, dan tingkat kematian akibat kecelakaan lalu lintas juga mengalami peningkatan pesat.

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan angkutan massal adalah mengurangi tingkat kemacetan, mengurangi polusi udara (bersifat ramah lingkungan), dan mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas yang sering dialami oleh pengguna kendaraan pribadi.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) berupaya untuk mewujudkan integrasi antarmoda

transportasi, mengalihkan trayek angkutan kota (angkot) dan *Bus Rapid Transit* (BRT), membangun fasilitas halte bus di dekat stasiun *Light Rail Transit* (LRT), serta memberikan keamanan dan kenyamanan kepada pengguna angkutan umum. Hal ini bertujuan agar pengguna angkutan umum dapat menikmati berbagai manfaat yang ditawarkan.

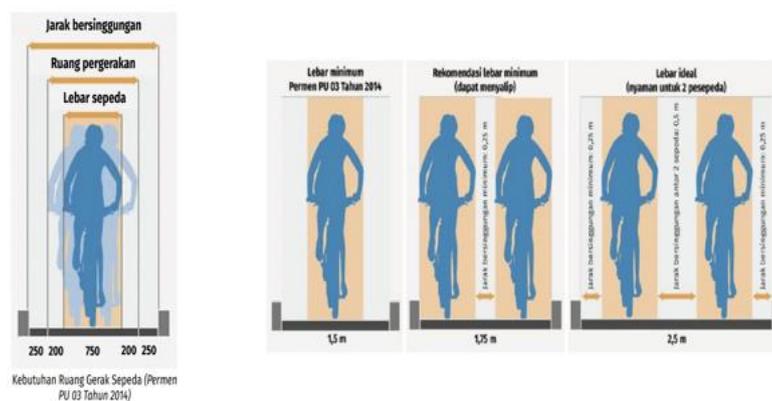
2.4.2 Lajur Sepeda

Lajur sepeda adalah lajur yang khusus diperuntukkan untuk lalu lintas pengguna sepeda dan kendaraan yang tidak bermesin yang memerlukan tenaga manusia, dipisah dari lalu lintas kendaraan bermotor untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas pengguna sepeda. Penggunaan sepeda memang perlu diberi fasilitas untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda dan bisa meningkatkan kecepatan berlalu lintas bagi para pengguna sepeda. Di samping itu penggunaan sepeda perlu didorong karena hemat energi dan tidak mengeluarkan polusi udara yang signifikan.

Pemisahan jalan biasanya menggunakan beton atau tambahan media jalan seperti *stick cone* yang dipasang berjarak sepanjang jalur sepeda. Langkah ini sejalan dengan misi Pemprov DKI Jakarta dalam menjadikan pejalan kaki dan pesepeda sebagai prioritas pertama dalam penanganan Transportasi DKI Jakarta. Jalur sepeda terbagi menjadi 3 tipe yakni:

1. Tipe A adalah Lajur Sepeda Terproteksi, lajur sepeda berada di badan jalan atau di luar badan jalan agar tidak bercampur dengan kendaraan lain.
2. Tipe B adalah Lajur Sepeda di Trotoar lajur sepeda yang terpisah secara fisik dari badan jalan kendaraan bermotor.
3. Tipe C adalah Lajur Sepeda Berbagi, lajur sepeda berada pada badan jalan dan terpisah menggunakan pemisah berupa marka jalan.

Cara jaringan jalan umum dirancang, dibangun, dan dikelola dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap utilitas dan keselamatan bersepeda. Jaringan bersepeda mungkin dapat menyediakan rute langsung dan nyaman bagi pengguna, meminimalkan penundaan dan upaya yang tidak perlu dalam mencapai tujuan mereka. Pemukiman dengan jaringan jalan padat dari jalan-jalan yang saling berhubungan cenderung menjadi lingkungan bersepeda utilitas yang layak.



Gambar 2. 4 Karakteristik Lajur Sepeda

Sumber: ITD, 2020

Pada Gambar 2.1 Karakteristik lajur sepeda memiliki lebar lajur sekurang-kurangnya 1 meter cukup untuk dilewati satu sepeda dengan ruang bebas di kiri dan kanan sepeda yang cukup, dan jalur untuk lalu lintas dua arah sekurang-kurangnya 2 meter.

Karakteristik lajur sepeda memiliki lebar lajur sekurang-kurangnya 1 meter cukup untuk dilewati satu sepeda dengan ruang bebas di kiri dan kanan sepeda yang cukup, dan jalur untuk lalu lintas dua arah sekurang-kurangnya 2 meter. Dalam proses desain, lebar jalur sepeda ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut:

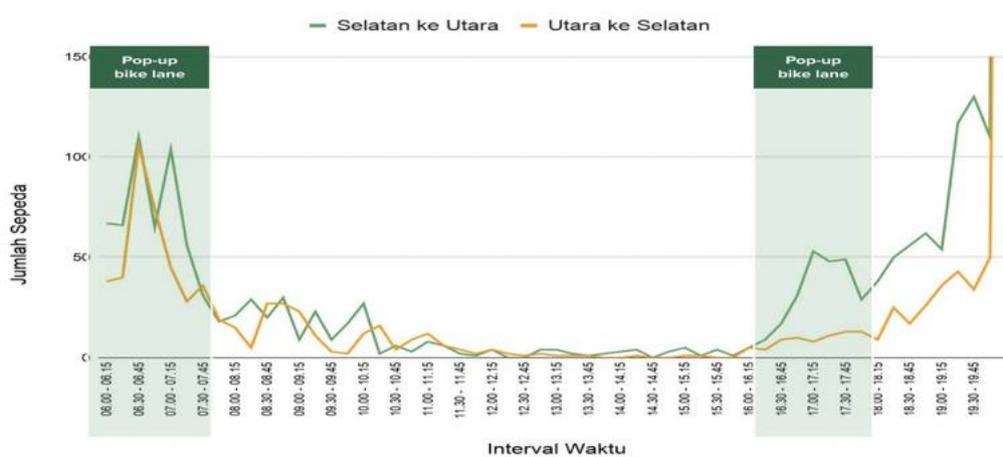
1. Lebar sepeda itu sendiri dalam keadaan diam (statis).
2. Ruang yang diperlukan untuk pergerakan sepeda dan pengendara di sekitarnya.
3. Jarak antara pesepeda yang berdekatan untuk menghindari tabrakan atau bersinggungan.

4. Jarak antara jalur sepeda dengan hambatan di sekitarnya, seperti kendaraan lain atau objek lainnya.
5. Ketinggian ruang bebas di atas jalur sepeda yang perlu dipertimbangkan agar pesepeda dapat melintas tanpa hambatan.

Semua parameter ini menjadi pertimbangan penting dalam menentukan lebar jalur sepeda yang optimal. Rekomendasi dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PM PUPR) No. 3 tahun 2014 yang menetapkan lebar lajur sepeda minimum sebesar 1,5 meter dianggap memadai, namun memiliki konsekuensi-konsekuensi tertentu, antara lain:

1. Tidak ada ruang untuk melakukan penyusulan di antara pesepeda, terutama ketika kecepatan pesepeda berbeda-beda.
2. Tidak memungkinkan pesepeda untuk bersebelahan dengan nyaman dan aman, sehingga kurang mendukung kegiatan sepeda yang seringkali melibatkan interaksi sosial.

Meskipun lebar jalur sepeda sebesar 1,5 meter memenuhi standar minimum, namun penting untuk mempertimbangkan kebutuhan pesepeda dalam hal penyusulan, keselamatan, dan kenyamanan saat bersepeda.



Sumber: ITDP, 2020

Gambar 2. 5 Grafik Jumlah Pengguna Sepeda 14 Jam

Sumber: ITDP, 2020

Pada Gambar 2.2 merupakan grafik yang menggambarkan hasil survei mengenai volume pengguna sepeda di sepanjang ruas jalan Jenderal Sudirman - Thamrin selama satu hari, mulai dari pukul 06.00 hingga 20.00. Daerah yang berwarna hijau menunjukkan waktu di mana fasilitas Pop-Up Bike Lane (PUBL) beroperasi, sementara daerah yang berwarna putih menunjukkan waktu di mana PUBL tidak beroperasi. Grafik ini mengindikasikan bahwa banyak pengguna sepeda yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas PUBL karena durasinya yang relatif singkat.

2.4 Kerangka Berpikir

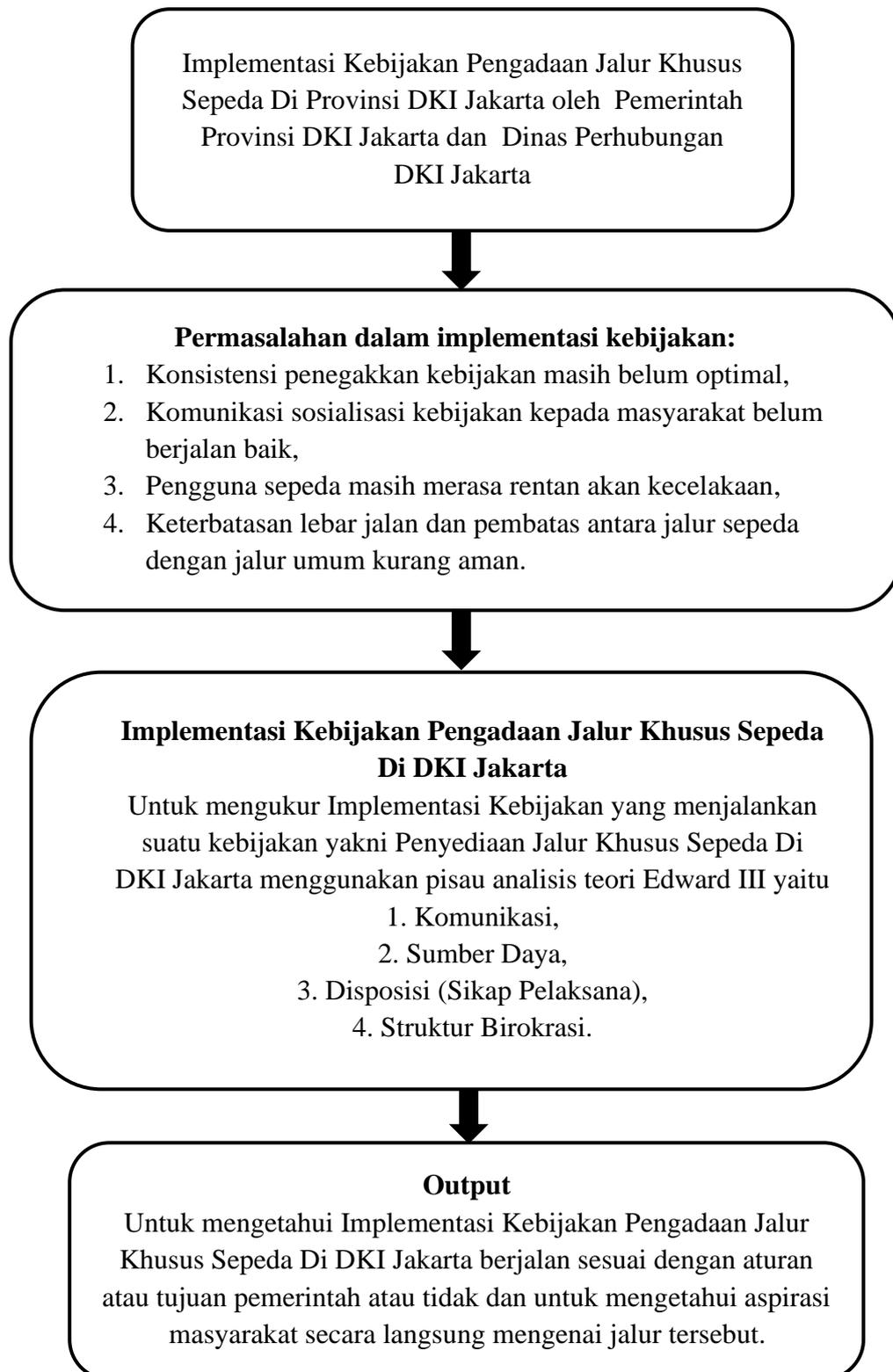
Tujuan dari sebuah kerangka pemikiran adalah untuk menyediakan arah penelitian yang transparan dan dapat dimengerti (Sugiyono, 2017: 92). Kerangka kerja memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar mengumpulkan pengetahuan dari berbagai sumber atau pemahaman yang sederhana. Implementasi Kebijakan Jalur Khusus Sepeda Di DKI Jakarta diinisiasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan pemerintahan khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengubah paradigma kebijakan transportasi yang semula *car oriented* menjadi *transit oriented*. Dalam upaya mewujudkan kota Jakarta yang berbasis transit dan sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan dengan membenahi sarana dan prasarana Transportasi Publik, khususnya menyediakan jalur khusus sepeda.

Kebijakan jalur khusus sepeda saat ini dihadapkan pada sejumlah masalah yang menghambat pencapaian tujuan yang diinginkan. Terdapat fragmentasi dan pemisahan instansi terkait, kurangnya koordinasi antara Lembaga pemerintah dan masyarakat, pembatasan sumber daya, kurangnya konsistensi penegakkan kebijakan serta ketidakefektifan pemantauan dan evaluasi. Masalah-masalah ini menghambat implementasi yang efektif dan menyebabkan kebijakan jalur sepeda tidak berjalan optimal dalam

meningkatkan keselamatan bersepeda, mengurangi kemacetan, mendorong keberlanjutan transportasi dan meningkatkan kualitas udara.

Untuk mengatasi masalah diatas, maka dipilih teori Edward III yang mempunyai indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi untuk memudahkan pemahaman atas penelitian ini. Berdasarkan observasi awal yang berlandaskan teori Edward III, maka dapat disimpulkan bahwa:

Pada indikator komunikasi, untuk mengetahui bagaimana komunikasi penyampaian antara komunikator dan komunikan berjalan. Pada poin sumber daya, untuk mengetahui bagaimana SDM melaksanakan kebijakan, kualitas pelaksana, serta fasilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan baik secara anggaran maupun fasilitas kerja. Pada poin disposisi (sikap pelaksana) yaitu untuk mengetahui bagaimana sikap ego sektoral dan faktor pendorong yang menjadi motivasi bagi pelaksana kebijakan. Poin terakhir, pada struktur birokrasi bagaimana pembagian tugas dan mekanisme pelaksanaan melalui penetapan Prosedur Operasi Baku (*Standard Operating Procedure*).



Gambar 2. 6 Kerangka Pemikiran